

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang krusial dalam rangka mencapai terwujudnya amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Infrastruktur yang memadai dan merata hingga ke pelosok negeri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dengan ini, kesejahteraan umum diharapkan dapat tercapai.

Berbicara soal pembangunan infrastruktur, maka tak lepas kaitannya dengan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terdapat banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR, mulai dari fasilitas yang mendukung transportasi seperti jalan raya dan jembatan, fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, hingga konstruksi dengan fungsi khusus terkait sumber daya alam seperti bendungan. Pemerintah kini sedang berupaya untuk terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan hingga fasilitas-fasilitas tersebut dapat dinikmati seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia.

Dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0 terkait dengan pekerjaan umum, dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang profesional. Kementerian PUPR berupaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kerja konstruksi yang profesional dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang konstruksi. Maka dari itu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1159/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi dalam rangka Pendirian Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, didirikanlah Politeknik Pekerjaan Umum.

Politeknik Pekerjaan Umum merupakan satker yang baru mulai beroperasi pada tahun 2019 lalu dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Satker ini berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2020, pengelolaan dana/anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Politeknik Pekerjaan Umum yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penggunaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, satker yang belum lama berdiri ini semestinya sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan praktik akuntansinya.

Menurut PMK 234/PMK.05/2020, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam

periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam PSAP No. 12 dijelaskan bahwa beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Sedangkan belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Belanja yang diklasifikasikan berdasar klasifikasi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa pos. Dalam PSAP No. 12 dicontohkan bahwa klasifikasi belanja menurut ekonomi dikelompokkan dalam pos belanja operasional, belanja modal, dan transfer.

Menurut PSAP No. 12, belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Akun-akun belanja yang termasuk dalam belanja operasi terpengaruh secara signifikan oleh kebijakan-kebijakan terkait kegiatan sehari-hari suatu satker, tidak terkecuali satker yang baru berdiri. Politeknik Pekerjaan Umum adalah satker baru yang akan penulis teliti pada karya tulis ini untuk melihat kesesuaian praktik akuntansi beban dan belanja operasi dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan beban dan belanja pemerintah adalah sebagai berikut.

1. “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung dan Beban Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung” ditulis oleh Jemy Billy Massie dan terbit pada tahun 2016. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk belanja dan beban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado” ditulis oleh Jantje J. Tinangon, Jefri Fanuel Motos, dan Jessy D. L. Warongan pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemberlakuan akuntansi belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian-penelitian tersebut mengkaji akuntansi beban dan belanja pemerintah di tingkat daerah (SKPD). Pada kesempatan kali ini, penulis ingin melakukan penelitian terkait akuntansi beban dan belanja pemerintah pada satker baru di tingkat pusat.

Dari hal-hal yang telah diuraikan, timbul keinginan penulis untuk melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk menuangkan hasil tinjauan tersebut dalam karya tulis tugas akhir dengan mengangkat judul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Beban dan Belanja Operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk membahas beberapa masalah dalam karya tulis tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana penganggaran terkait belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum?
4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penganggaran terkait belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang spesifik mengenai topik yang dipilih, penulis membatasi ruang lingkup penulisan. Pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini akan berfokus pada peninjauan kesesuaian penerapan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum periode 2021. Penerapan akuntansi beban dan belanja operasi mencakup penganggaran, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terkait beban dan belanja operasi.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Manfaat tersebut, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan atas teori-teori akuntansi beban dan belanja operasi yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Menambah pemahaman penulis mengenai penerapan akuntansi beban dan belanja operasi pada suatu satker secara riil.

###### **b. Bagi Satuan Kerja**

Menjadi pilihan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja satker dalam hal praktik akuntansi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Membantu pengembangan masalah dan/atau pengembangan teori pada penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat penjelasan yang penulis sampaikan mengenai teori dan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk meninjau penerapan akuntansi beban dan belanja operasi pada satker di lingkungan pemerintah pusat.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan atas hasil tinjauan penerapan akuntansi beban dan belanja operasi pada Politeknik Pekerjaan Umum. Pada bagian gambaran umum objek dijelaskan sejarah singkat, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi. Penjabaran jawaban atas rumusan masalah akan dituangkan pada bagian pembahasan.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini memuat simpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjadi bagian penutup dari karya tulis tugas akhir ini. Beberapa saran yang ditujukan kepada satker objek penelitian pada karya tulis ini,

yaitu Politeknik Pekerjaan Umum juga dituangkan pada bagian ini sebagai bahan pertimbangan evaluasi praktik akuntansi beban dan belanja operasi pada satker ini.